

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Saat ini organisasi sektor publik dituntut untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* merupakan sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik (Rosjidi, 2010). Terdapat tiga prinsip dasar dalam penyelenggaraan *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Wilopo (2006) menyebutkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud* adalah melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan menetapkan Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia marak terjadi akhir-akhir ini, dimana hal tersebut menjadi pusat perhatian berbagai media di Indonesia maupun dunia. Kasus kecurangan yang sering terjadi baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta adalah kasus korupsi. Pada sektor

publik kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana (Thoyibatun, 2009:2). Di instansi pemerintah, kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah. Korupsi merupakan jenis *fraud* yang sering dilakukan oleh seseorang dengan jabatan atau wewenang yang tinggi pada suatu instansi. Kecenderungan kecurangan akuntansi telah mendapat banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Tindak korupsi yang sering kali dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam entitas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga angka yang tercantum di laporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya. Selain sebagai alat komunikasi kepada publik, laporan keuangan juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik mengenai kinerja dari entitas publik. Pertanggungjawaban kepada publik harus dilakukan secara transparan. Jika dalam laporan keuangan mengandung *fraud*, maka pemerintah di nilai tidak memenuhi fungsi utamanya berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan data *Transparency International* pada tahun 2014, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di ranking 107 dari 174, bersama dengan Argentina dan Djibouti. Sedangkan untuk barometer korupsi di Indonesia, berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Transparency International* pada tahun 2013 diperoleh hasil bahwa 91% responden merasa bahwa kepolisian adalah institusi yang banyak melakukan tindakan korupsi, berikutnya adalah parlemen legislative (89%), pengadilan (86%), partai politik (86%), kantor public/PNS (79%), bisnis (54%) dan sistem pendidikan (49%) (sumber: [transparency.org](http://transparency.org)).

Berdasarkan data dari *infokorupsi.com* terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Surakarta. Kasus tersebut antara lain kasus korupsi senilai Rp 13 milyar oleh Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) kota Solo, penyelewengan dana hibah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp 100 juta yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta, mantan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) Pemkot Solo mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp134 juta.

*American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan sesuai dengan aturan. Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat.

Selain itu, pengendalian internal juga memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan perusahaan. Oleh sebab itu, jika pengendalian internal yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan efektif maka pengendalian internal dapat diandalkan untuk melindungi dari kecurangan termasuk apabila ada karyawan yang berniat melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi (Davia *dkk*, 2000:119). Penelitian Artini (2014) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain faktor peningkatan pengendalian internal faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi adalah ketaatan aturan akuntansi. Standar akuntansi seringkali dijadikan alasan pembenaran (rasionalisasi) oleh para pelaku kecurangan laporan keuangan yang merupakan bagian paling rentan terhadap perilaku kecurangan. Pada dasarnya standar akuntansi dibuat selain bertujuan untuk menyeragamkan format laporan, juga bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan. Wilopo (2006) menyatakan bahwa manajemen perusahaan harus melaksanakan aturan akuntansi untuk mengatasi permasalahan keagenan. Hasil penelitian Adelin (2013) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan adalah asimetri informasi. Asimetri informasi yaitu kondisi dimana salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibanding pihak lainnya. Najahningrum (2013) menyatakan bahwa apabila terjadi

kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Supaya masalah yang berkembang dapat berkurang, kedua belah pihak bisa mengatur kembali kontrak yang disepakati dalam rangka memberikan motivasi agar dapat mengikuti prosedur kerja dan aturan akuntansi yang berlaku. Penelitian Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Menurut Najahningrum (2013) komitmen organisasi merupakan sikap mental individu berkaitan dengan tingkat kelayakan terhadap organisasi tempat individu bekerja. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, pegawai tersebut cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang bisa saja menghambat tercapainya tujuan organisasi. Sebaliknya, jika pegawai memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasinya, maka pegawai cenderung akan melakukan hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan organisasi demi tujuan pribadinya sendiri. Salah satu contoh tindakan tersebut adalah kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2013) diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Meningkatkan budaya organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling berkaitan satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat

sekitar secara keseluruhan (Amrizal, 2004). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2013) mengatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan..

Beu dan Buckley (2001:57-73) dalam Thoyibatun (2009) menjelaskan perilaku tidak etis adalah suatu sikap atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dimana tujuan tersebut berbeda dari tujuan utama yang telah disepakati sebelumnya. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Adelin (2013) mengatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Mirza Zulkarnain (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Mirza Zulkarnain (2013) terletak pada variabel independen. Alasan penelitian dilakukan di Surakarta dikarenakan banyaknya isu mengenai dugaan korupsi yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi sektor pemerintahan untuk mengetahui kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor ini terdiri dari pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, budaya organisasi dan perilaku tidak etis. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan judul penelitian sebagai berikut **“Analisis Faktor-faktor yang**

**Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada Dinas Kota Surakarta)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta?
5. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta?

6. Apakah terdapat pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh terhadap ketaatan aturan akuntansi kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta.
5. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta.



6. Untuk menganalisis pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada persepsi pegawai bagian keuangan Dinas Kota Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui apakah pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, budaya organisasi dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Kota Surakarta.

2. Bagi Dinas Kota Surakarta

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kota Surakarta untuk mengetahui arti pentingnya pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, budaya organisasi dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Kota Surakarta.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai landasan teori, kerangka pemikiran yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat yang diperlukan dan hasil analisis data.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data, keterbatasan yang terdapat pada penelitian, dan saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya.